

GAMBARAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

OVERVIEW OF ECONOMIC POTENTIAL BOGOR DISTRICT IN 2021

Eka Husni¹, Shinta Nasution²

^{1,2}Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Jl. Segar III Kompleks Perkantoran Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, Indonesia

¹ekahnh@gmail.com

²nasutionshinta1000@gmail.com

ABSTRACT

The development of economic development in an area can be seen from the indicators of the level of economic growth. The rate of economic growth of each sub-district varies greatly. This is influenced by the growth rate of several sectors with varying patterns depending on the characteristics of the sector in the sub-district. Until now, data on the economic potential of Bogor Regency only covers the district level and has not been specifically covered in the economic potential of each sub-district. Meanwhile, indicators of sub-district economic potential will strengthen and sharpen analysis in the context of making economic policies in order to improve people's welfare. This study aims to collect data and analyze business potential in each sub-district. Data were collected through surveys in 38 sub-districts and analyzed by descriptive statistics. The results showed that the economic potential in each sub-district was dominated by the secondary business sector. Each business sector that fills the economic potential in each sub-district varies widely, but the major trends are in the four economic sectors, namely the Manufacturing Industry (58.8%), Provision of Food and Drink Accommodation (10.9%), Wholesale and Retail Trade (10, 0%), and agriculture, forestry and fisheries (9.2%). namely the basis of the strength of the economic potential of Bogor Regency (9.4%), secondary (60.1%) and tertiary (31.0%). The scale of micro-enterprises still dominates the economic potential in each sub-district, so that business attributes such as income and work follow the scale of the business.

Keywords: *Economic potential, economic growth rate, sub-district*

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat diketahui dari indikator tingkat pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan beberapa sektor dengan pola yang bervariasi tergantung dari karakteristik sektor tersebut di kecamatan. Hingga kini, data potensi ekonomi Kabupaten Bogor hanya mencakup pada level kabupaten dan belum secara spesifik mencakup pada potensi ekonomi di setiap kecamatan. Sedangkan indikator potensi ekonomi kecamatan akan memperkuat dan mempertajam analisis dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan analisis potensi usaha di setiap kecamatan. Data dikumpulkan melalui survei di 38 kecamatan dan dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan lebih didominasi oleh sektor usaha sekunder. Masing-masing sektor usaha yang mengisi potensi ekonomi di setiap kecamatan sangat bervariasi, akan tetapi kecenderungan besarnya pada empat sektor ekonomi yakni Industri Pengolahan (58,8%), Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum (10.9%), Perdagangan Besar dan Eceran (10,0%), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (9,2%). Secara kumulatif kekuatan potensi ekonomi Kabupaten Bogor yaitu primer (9.4%), sekunder (60.1%) dan tersier (31.0%). Skala usaha mikro masih mendominasi potensi ekonomi di masing-masing kecamatan, sehingga atribut usaha seperti pendapatan dan tenaga kerja mengikuti besaran skala usaha tersebut.

Kata Kunci: Potensi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, kecamatan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi. Arsyad

(1999) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan.

Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, maka dapat digunakan indikator tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan disamping indikator ekonomi makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*). Dengan demikian melalui data PDRB dapat diketahui kemampuan ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Kebutuhan terhadap data PDRB saat ini bukan hanya dalam lingkup propinsi atau kabupaten, tetapi dibutuhkan juga data PDRB dalam lingkup yang lebih kecil yaitu PDRB Kecamatan. Dalam melihat dinamika pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor 2012-2017

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	135.882.245	12,93	110.685.276	6,14
2014	151.285.005	11,34	117.339.503	6,01
2015	168.081.425	11,10	124.486.977	6,09
2016	184.249.649	9,62	131.760.367	5,84
2017	200.896.790	9,04	139.560.675	5,92
2018	219.609.579	9,31	148.204.049	6,19
Rata-rata	176.667.449	10,56	128.672.808	6,03

Sumber: Web BPS Kabupaten Bogor

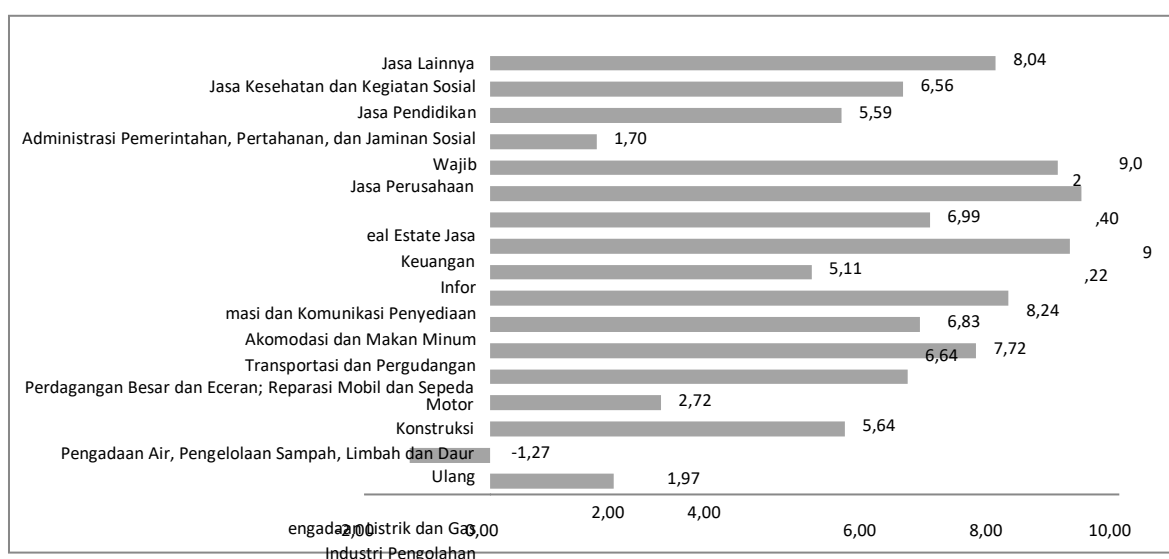
PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi pada suatu kecamatan. Data Tabel 1. memberikan proyeksi bahwa PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Bogor angka elastisitas pertumbuhannya berkisar antara 9% hingga 12% lebih atau rata-rata tahunannya sebesar 10,56%. PDRB ADHK mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55%. Angka pertumbuhan PDRB menunjukkan elastisitas optimis dibanding pertumbuhan nasional.

Menurut berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik (2019) menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB)

atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp 59,1 Juta atau US\$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

Merujuk pada data nasional tentang dinamika Produk Domestik Bruto seperti dijelaskan diatas, dapat dilihat turunannya bahwa data PDRB merupakan gambaran kemampuan kecamatan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk menjadi suatu proses produksi. Adanya perbedaan nilai PDRB yang dihasilkan oleh setiap kecamatan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya ekonomi yang berupa sumber daya tenaga kerja (*labor*) dan sumber daya modal (*capital*) yang terdapat di kecamatan tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan data yang belum lengkap tersedia di kecamatan menyebabkan nilai PDRB beberapa sektor menggunakan indikator yang tersedia di tingkat kabupaten.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2019

Secara sektoral Struktur perekonomian Kabupaten Bogor didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor menunjukkan tren positif. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sektor Real Estate mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,40% . Sektor Industri pengolahan, Sektor Perdagangan dan eceran dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penggerak utama perekonomian kabupaten Bogor, masing-masing secara berturut-turut memiliki pertumbuhan ekonomi 5,64%, 6,83% dan 1,97%.

Rendahnya ketergantungan PDRB Kabupaten Bogor dari sektor primer dibandingkan sektor sekunder atau tersier adalah hal yang positif. Tren ini harus dipertahankan dengan mengedepankan pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasiskan pada perekonomian rakyat dan kreativitas ekonomi. Data menunjukkan bahwa di tahun 2018 lalu, PAD Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp 2.88 Trilitun. Sementara di tahun 2020 Kabupaten Bogor target menurun menjadi sebesar Rp 1,5 Triliyun. Mesti dihadapkan pada situasi pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2020. Jumlah PAD yang terealisasi sudah mencapai Rp. 1,7 Triliun, atau 114% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 Triliun. Namun, dibanding realisasi 2019 sebesar Rp.1,9 Triliun, realisasi PAD Kabupaten Bogor turun sebesar Rp 200 miliar.

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan beberapa sektor yang mana sektor tersebut di beberapa kecamatan sangat bervariasi tergantung dari karakteristik sektor tersebut di kecamatan. Bagi suatu daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Dengan kondisi aktual tersebut, maka diperlukan sebuah analisis perekonomian yang mendalam, yaitu salah satunya melalui peta struktur potensi ekonomi. Hingga kini, data indikator potensi ekonomi Kabupaten Bogor hanya mencakup pada Kabupaten Bogor secara keseluruhan, dan belum secara spesifik mencakup pada potensi ekonomi di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Sedangkan indikator potensi ekonomi Kecamatan akan memperkuat dan mempertajam analisis dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa potensi ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Suryani, 2013; Kurniawan 2016; Sutikno dan Batoro, 2016; Rizania, 2017; Putra, 2018; Takalumang, 2018; Haryono dan Hudoyo, 2019, Setiandono, 2021). Maqin (2014) berpendapat bahwa infrastruktur listrik, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah industri besar memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi (Julianto dan Suparno, 2016).

Untuk itu, sebagai suatu langkah, perlu dilakukan sebuah penelitian awal struktur potensi ekonomi yang selanjutnya akan menjadi basis atau dasar bagi penghitungan PDRB Kecamatan. Basis atau dasar tersebut yakni dalam bentuk data yang akan menjadi basis populasi, yang akan digunakan dalam menghitung PDRB Kecamatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1)

Untuk melakukan pendataan potensi usaha di setiap kecamatan yang mencakup 17 sektor atau lapangan usaha. 2) Untuk melakukan analisis kondisi potensi usaha hasil pendataan di setiap kecamatan.

2. METODE PENELITIAN

Kerangka mendasar kajian diawali dengan survei potensi ekonomi di kabupaten Bogor. Survei ini dilakukan dengan dua objektif, yakni identifikasi potensi ekonomi dan inventarisir potensi ekonomi yang menghasilkan dugaan atas potensi ekonomi yang menjadi faktor-faktor pembentuk potensi PDRB. Setelah ditelaah lebih lanjut maka akan dihasilkan baseline survei sebagai kerangka kajian potensi ekonomi regional dalam mengkaji peningkatan PDRB kabupaten Bogor.

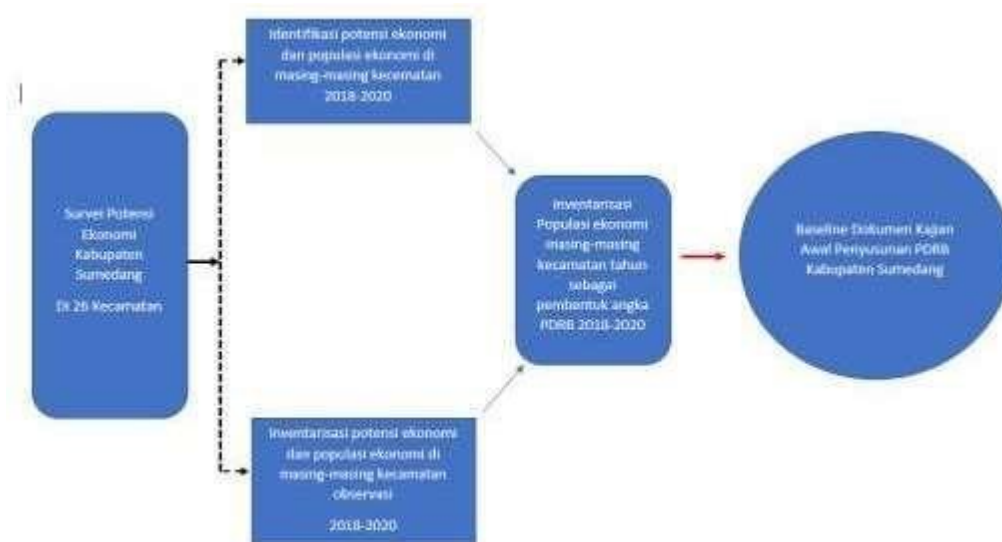
Survei ini merupakan sebuah pendataan sehingga tidak lagi melibatkan sampel, melainkan pendataan dari populasi unit usaha atau sektor usaha. Respondennya adalah seluruh kecamatan (40 kecamatan) di Kabupaten Bogor. Pendataan sektor usaha dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada di masing-masing kecamatan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi keadaan riil potensi ekonomi dari populasi sektor usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Dari hasil identifikasi maka dihasilkan daftar sektor usaha yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Langkah kedua yakni menginventarisir potensi ekonomi dari hasil inventarisir data yang telah dilakukan. Inventarisir ini berfungsi untuk melakukan pemilihan atas jenis-jenis sektor usaha yang ada. Ada batasan inventarisir sektor potensi ekonomi yakni yang kondisinya secara konsisten masih berjalan dari tahun 2018-2020. Setelah mampu diidentifikasi kemudian dilakukan langkah ketiga adalah pendataan dengan melakukan wawancara pengisian angket yang telah disiapkan sebagai upaya penarikan data kajian untuk kemudian dijadikan baseline dan dilakukan analisa sebagai upaya awal pembentukan dokumen untuk keperluan kajian-kajian mendatang untuk keperluan membedah potensi PDRB Kabupaten Bogor.

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dokumen sekunder dan juga melalui wawancara oleh staf di kecamatan yang menangani bidang ekonomi. Kemudian koleksi data primer dan dilengkapi dengan data-data sekunder yang ada di kecamatan maupun data-data pendukung di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait maupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Data masing-masing kecamatan tidak dibatasi jumlahnya, karena data yang diambil disesuaikan dengan data riil yang ada di lapangan masing-masing kecamatan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan telaah dan juga *quality control* (QC) atas validasi dan reliabilitas data dengan cara melakukan pemeriksaan atas isian-isian angket. Langkah berikutnya, setelah isian sudah sesuai maka dilakukan pengentrian data atau tabulasi. Kemudian setelah tabulasi dapat diselesaikan maka data dapat dikelola sesuai kepentingan objektif kajian yang telah disebutkan di bagian awal. Teknis analisis data sebagai upaya menjawab kepentingan objektif penelitian adalah dilakukan dengan melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis ini dimunculkan untuk menjawab keperluan pemetaan tentang segmentasi sektor usaha di masing-masing kecamatan. Hal ini sebagai bahan row data untuk melihat potensi ekonomi masing-masing kecamatan.

Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan ekonomi seputar informasi utama berfungsi untuk mengkonfigurasi kekuatan ekonomi masing-masing kecamatan. Dari data tersebut juga kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk membangun faktor pembentuk potensi ekonomi yang digali dari kondisi riil potensi ekonomi masing-masing kecamatan. Untuk melihat kekuatan spasial kemudian dilakukan crosstab atau analisis silang dengan masing-masing kecamatan. Hasil dari crosstab akan terlihat peta kekuatan potensi ekonomi masing-masing kecamatan.



Gambar 2. Alur Kerangka Penelitian Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendataan diperoleh dari 38 kecamatan dari 40 desa, 397 desa dari 410 desa dan 16 kelurahan di Kabupaten Bogor. Data ini akan memberikan penjelasan secara rinci potensi ekonomi yang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor.

3.1. Komposisi Bidang Usaha Berdasarkan Kecamatan-Desa

Kabupaten Bogor sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa barat merupakan daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya dimana dengan adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk kreatif dalam melaksanakan kebijakannya demi meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka juga akan berdampak positif pada tingkat pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa Barat umumnya.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa komposisi usaha di 40 kecamatan Kabupaten Bogor didominasi sektor sekunder. Sektor sekunder meliputi 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan listrik; 3) Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Konstruksi. Industri tersier menempati posisi kedua sebagai industri dominan di 40 kecamatan. Industri ini terdiri dari 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2)

Transportasi dan Pergudangan; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; 6) Real Estate; 7) Jasa Perusahaan; 8) Jasa Pendidikan; 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 10) Jasa Lainnya. Sementara industri primer yang terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian menempati posisi terakhir sebagai sektor usaha yang mendominasi di 40 kecamatan.

Tabel 2. Komposisi Bidang Usaha Berdasarkan Kecamatan-Desa

	Kecamatan	Data	Primer	Sekunder	Tersier	Total
1	Babakan Madang	25	16%	48%	36%	100%
2	Bojong Gede	24	0%	17%	83%	100%
3	Caringin	25	4%	72%	24%	100%
4	Cariu	50	20%	26%	54%	100%
5	Ciampea	63	11%	29%	60%	100%
6	Ciawi	49	10%	55%	35%	100%
7	Cibinong	75	1%	92%	7%	100%
8	Cibungbulang	51	12%	42%	46%	100%
9	Cigombong	53	4%	79%	17%	100%
10	Cigudeg	39	21%	28%	51%	100%
11	Cijeruk	25	12%	72%	16%	100%
12	Cileungsi	49	6%	45%	49%	100%
13	Ciomas	48	4%	79%	17%	100%
14	Cisarua	24	2%	49%	49%	100%
15	Ciseeng	74	18%	65%	18%	100%
16	Citeureup	50	0%	72%	28%	100%
17	Dramaga	50	0%	100%	0%	100%
18	Gunung Putri	25	0%	44%	56%	100%
20	Jasinga	51	0%	67%	33%	100%
21	Jonggol	54	4%	83%	13%	100%
22	Kemang	50	8%	86%	6%	100%
23	Klapanunggal	25	8%	76%	16%	100%
24	Leuwiliang	50	2%	56%	42%	100%
25	Leuwisadeng	26	19%	33%	48%	100%
26	Nanggung	26	31%	62%	8%	100%
27	Pamijahan	25	4%	76%	20%	100%
28	Parung	52	17%	38%	44%	100%
29	Rancabungur	48	19%	56%	25%	100%
30	Rumpin	3	0%	67%	33%	100%
31	Sukajaya	26	31%	62%	8%	100%
32	Sukamakmur	50	16%	44%	40%	100%
33	Sukaraja	25	4%	96%	0%	100%
34	Tajurhalang	69	10%	81%	9%	100%
35	Taman Sari	50	18%	38%	44%	100%
36	Tanjungsari	23	0%	83%	17%	100%
37	Tenjo	50	16%	26%	58%	100%
38	Tenjolaya	50	10%	36%	54%	100%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Data diatas juga menunjukkan bahwa industri primer terbesar terdapat di Kecamatan Nanggung sebesar 31%, industri sekunder terbesar di Kecamatan Dramaga sebesar 100% dan industri tersier terbesar terdapat di Kecamatan Bojong Gede sebesar 83%. Hal ini sesuai fakta di lapangan dimana Kecamatan Nanggung merupakan wilayah yang pertanian dan menjadi lumbung padi di Kabupaten Bogor. Tingginya sektor industri primer di Kecamatan Nanggung

juga disumbang oleh adanya sektor pertambangan yaitu emas yang dikelola oleh PT Antam. Selain itu wilayah Kecamatan Nanggung juga masih terdapat hutan yang dikenal dengan kawasan Gunung Halimun yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Potensi industri primer juga dikembangkan ke arah wisata dengan model pengembangan Geopark yang dikenal dengan Geopark Pongkor.

Dominannya sektor industri sekunder di Kecamatan Dramaga didasarkan fakta bahwa wilayahnya menjadi sentra pengolahan industri seperti buah-buahan, sepatu, tas, dan produk lainnya. Sementara tumbuhnya industri tersier di Kecamatan Bojong Gede didasarkan fakta lokasinya yang dekat dengan wilayah ibukota Kabupaten Bogor sehingga menjadi lokasi pemukiman penduduk. Kondisi demikian mendorong munculnya industri jasa diberbagai sektor untuk melayani kebutuhan masyarakat.

3.2. Distribusi Sektor Usaha Berdasarkan Kecamatan

Tabel 3. menggambarkan secara detail terkait distribusi sektor usaha berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui sebanyak 32 kecamatan didominasi sektor sekunder tipe 3 yaitu Industri Pengolahan. Dari 32 Kecamatan terdapat 25 kecamatan yang memiliki persentase industri sekunder tipe 3 diatas 50% yaitu Dramaga, Sukaraja, Cibinong, Tajurhalang, Kemang, Ciomas, Jonggol, Cigombong, Klapanunggal, Pamijahan, Caringin, Cijeruk, Citeureup, Cisarua, Tanjungsari, Rumpin, Jasinga, Nanggung, Sukajaya, Gunung Sindur, Ciseeng, Ranca Bungur, Ciawi, Leuwiliang, Cileungsi. Sementara sisanya yaitu 7 kecamatan memiliki persentase sektor industri sekunder tipe 3 dibawah 50% yaitu Kecamatan Babakan Madang, Gunung Putri, Sukamakmur, Tamansari, Tenjolaya, Parung, dan Ciampea. Kondisi tersebut diatas sejalan dengan hasil temuan Prasetya (2018) yang menyatakan bahwa sektor di Kabupaten Bogor tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan provinsi rata-rata yakni sektor industri pengolahan.

Tabel 3. Distribusi Sektor Usaha Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2021

Kecamatan	Primer		Sekunder							Tersier						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Babakan Madang	16%	0%	48%	0%	0%	0%	12%	0%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Bojong Gede	0%	0%	17%	0%	0%	0%	25%	4%	13%	0%	0%	0%	4%	8%	17%	13%
Caringin	4%	0%	72%	0%	0%	0%	12%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Cariu	18%	2%	22%	2%	2%	0%	24%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
Ciampea	10%	2%	29%	0%	0%	0%	24%	0%	19%	2%	0%	0%	3%	2%	0%	11%
Ciawi	10%	0%	55%	0%	0%	0%	12%	2%	4%	0%	2%	0%	4%	0%	2%	8%
Cibinong	1%	0%	91%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
Cibungbulang	13%	0%	42%	0%	0%	0%	17%	4%	4%	4%	2%	0%	2%	2%	4%	6%
Cigombong	4%	0%	77%	2%	0%	0%	2%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
Cigudeg	21%	0%	26%	0%	3%	0%	13%	0%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cijeruk	12%	0%	72%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	8%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
Cileungsi	2%	0%	50%	0%	2%	4%	29%	2%	2%	0%	2%	0%	0%	0%	2%	4%
Ciomas	4%	0%	82%	0%	2%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%

GAMBARAN POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021
Eka, Shinta

Kecamatan	Primer		Sekunder						Tersier							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cisarua	3%	0%	71%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	3%	3%	0%	6%	0%	0%	6%
Ciseeng	15%	0%	56%	0%	0%	0%	7%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
Citeureup	0%	0%	72%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Dramaga	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gunung Putri	0%	0%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	4%
Gunung Sindur	11%	0%	60%	0%	0%	0%	2%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jasinga	0%	0%	65%	2%	0%	0%	16%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
Jonggol	4%	0%	80%	2%	2%	4%	2%	2%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Kemang	8%	0%	86%	0%	0%	0%	2%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Klapanunggal	8%	0%	76%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Leuwiliang	2%	0%	54%	2%	0%	0%	8%	0%	18%	2%	2%	0%	0%	0%	2%	10%
Leuwisadeng	15%	4%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	4%
Nanggung	31%	0%	62%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
Pamijahan	4%	0%	76%	0%	0%	0%	8%	0%	4%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	4%
Parung	18%	0%	37%	0%	2%	0%	2%	0%	37%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
Ranca Bungur	19%	0%	56%	0%	0%	0%	15%	0%	2%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	4%
Rumpin	0%	0%	67%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sukajaya	31%	0%	62%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
Sukamakmur	15%	2%	44%	0%	0%	2%	23%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	4%	8%
Sukaraja	4%	0%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tajurhalang	11%	0%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tamansari	18%	0%	38%	0%	0%	0%	6%	0%	30%	0%	4%	0%	4%	0%	0%	0%
Tanjungsari	0%	0%	68%	0%	0%	0%	4%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
Tenjo	16%	0%	22%	0%	4%	0%	12%	0%	34%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	10%
Tenjolaya	0%	0%	38%	0%	2%	0%	36%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
Grand Total	9.4%		60.1%						31%							

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Keterangan:

Industri Primer: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian

Industri Sekunder: 3) Industri pengolahan; 4) Pengadaan listrik; 5) Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; 6) Konstruksi.

Industri Tersier: 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8) Transportasi dan Pergudangan; 9) Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman; 10) Informasi dan Komunikasi; 11) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; 12) Real Estate; 13) Jasa Perusahaan; 14) Jasa Pendidikan; 15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 16) Jasa Lainnya

Dari Tabel 3. diatas juga dapat diketahui bahwa hanya terdapat 2 kecamatan yang bertumpu pada sektor industri tersier tipe 7 (Perdagangan Besar dan Eceran) yaitu Kecamatan Bojong Gede dan Ciampea dengan persentase masing-masing sebesar 24% dan 25%. Sementara kecamatan yang bertumpu pada sektor industri tersier tipe 9 (Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman) terdapat 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tenjo sebesar 34%, Parung sebesar 37%, Leuwisadeng sebesar 41%, Cigudeg 38% dan Gunung Putri sebesar 44%. Adapun industri primer tidak ada satupun kecamatan yang menjadi tumpuan.

3.3. Distribusi Sub Sektor Usaha

Tabel 4. menggambarkan distribusi sub sektor usaha di Kabupaten Bogor, dimana didominasi industri pengolahan sebesar 928 usaha. Dari jumlah tersebut, Industri Makanan menempati posisi pertama dengan jumlah 537 usaha atau sekitar 33 % dari total jenis usaha Industri Pengolahan. Sub industri dominan lainnya ditempati oleh industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 174 industri dimana sub Industri Penyediaan Makanan dan Minuman memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 161 industri atau sekitar 9.9% dari total industri Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adapun industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi ketiga dengan jumlah 156 industri, dimana industri Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI berkontribusi tertinggi pada sektor tersebut yaitu sebesar 6.8%. Dengan demikian ketiga jenis sektor usaha yaitu primer, sekunder dan tersier telah mewarnai pertumbuhan industri di Kabupaten Bogor,

Tabel 4. Distribusi Sub Sektor Usaha di Kabupaten Bogor

Bidang Usaha - Sektor Usaha		Jumlah	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	156	10%
1	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI	110	6.8%
2	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan	1	0.1%
3	Perikanan	45	2.8%
2	Pertambangan dan Penggalian		
9	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan		
3	Industri Pengolahan	928	57.04%
10	Industri Makanan	537	33.0%
11	Industri Minuman	75	4.6%
12	Industri Pengolahan Tembakau	2	0.1%
13	Industri Tekstil	35	2.2%
14	Industri Pakaian Jadi	85	5.2%
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	36	2.2%
16	Industri Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan	39	2.4%
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	5	0.3%
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	8	0.5%
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	3	0.2%
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	10	0.6%
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	0.4%
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	1	0.1%
24	Industri Logam Dasar	2	0.1%
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	9	0.6%
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	4	0.2%
28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	1	0.1%
31	Industri Furnitur	13	0.8%
32	Industri Pengolahan Lainnya	42	2.6%
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	15	0.9%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6	0.4%
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	6	0.4

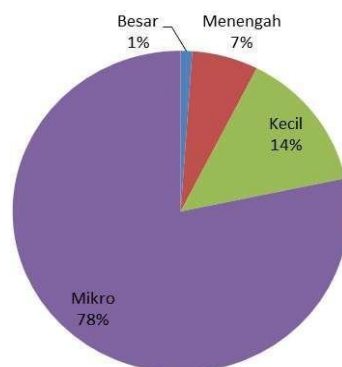
Bidang Usaha - Sektor Usaha		Jumlah	%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8	0.5%
37	Treatment Air	3	0.2%
38	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material.	3	0.2%
39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	2	0.1%
6	Konstruksi	38	0.8%
41	Konstruksi Gedung	1	0.1%
42	Konstruksi Bangunan Sipil	3	0.2%
43	Konstruksi Khusus - Material	1	0.1%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161	9.8%
45	Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12	0.7%
46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7	0.4%
47	Perdagangan Eceran - Kelontongan (Bukan Mobil dan Sepeda Motor)	142	8.7%
8	Transportasi dan Pergudangan	8	0.5%
49	Angkutan Darat dan Angkutan	6	0.4%
52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	2	0.1%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174	10.7%
53	Aktivitas Pos dan Kurir	1	0.1
55	Penyediaan Akomodasi	12	0.7
56	Penyediaan Makanan dan Minuman	161	9.9
10	Informasi dan Komunikasi	9	0.7%
58	Aktivitas Penerbitan	1	0.1
59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	2	0.1
60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman	1	0.1
61	Telekomunikasi - Counter	1	0.1
62	Aktivitas Pemograman, Konsultasi Komputer dan YBDI	1	0.1
63	Aktivitas Jasa Informasi	3	0.2
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	6	0.4%
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	5	0.3%
65	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	1	0.1%
12	Real Estat	6	0.4%
68	Real Estat	6	0.4%
13	Jasa Perusahaan	16	0.7%
69	Aktivitas Hukum dan Akuntansi	1	0.1%
72	Periklanan dan Penelitian Pasar	1	0.1%
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	5	0.3%
78	Aktivitas Ketenagakerjaan	1	0.1%
79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya	2	0.1%
81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Taman	2	0.1%
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor & Aktivitas Penunjang Usaha	4	0.2%
15	Jasa Pendidikan	4	0.2%
85	Pendidikan	4	0.2%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10	0.6%

Bidang Usaha - Sektor Usaha		Jumlah	%
86	Aktivitas Kesehatan Manusia	10	0.6%
17	Jasa Lainnya	93	5.7%
90	Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Kreativitas	11	0.7%
93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	6	0.4%
95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi & Perlengkapan RT	5	0.3%
96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	57	3.5%
97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	2	0.1%
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.	12	0.7%
Grand Total		1627	100%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

3.4. Skala Usaha Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan di Kabupaten Bogor jika ditinjau dari skala usaha secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebesar 78% merupakan usaha mikro, 15% usaha kecil dan usaha besar serta menengah masing-masing sebesar 1% dan 7%. Hal ini tercermin dalam Gambar 3. Dengan jumlah usaha mikro yang cukup besar harus disikapi dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja usaha tersebut mengingat perannya yang cukup strategis di Kabupaten Bogor khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Gambar 3. Ringkasan Skala Usaha yang Terdapat di Kabupaten Bogor Tahun 2021

Data distribusi skala usaha berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa industri besar secara berturut-turut didominasi oleh Kecamatan Cileungsi sebesar 14.3%, Caringin sebesar 8.0%, Tamansari sebesar 6.0%, Bojong Gede sebesar 4.0%, Cisarua sebesar 4.0%, Jonggol sebesar 3.6% dan Cariu sebesar 2.0%. Industri menengah secara berturut-turut didominasi oleh Kecamatan Rumpin sebesar 100%, Bojong Gede 36%, Cileungsi sebesar 24,5%, Cisarua 24%, Sukajaya 23,1%. Babakan Madang dan Sukamakmur sebesar 16%. Industri kecil secara berturut-turut didominasi oleh Kecamatan Sukajaya sebesar 65.4%, Tenjolaya sebesar 38.0%, Bojong Gede sebesar 36.0%, Tamansari sebesar 30.0%, Cisarua sebesar 28.0%, Cibungbulang sebesar

25.5%, Cariu sebesar 24.0%, Nanggung sebesar 23.1%, dan Tenjo sebesar 22.0%. Selanjutnya industri mikro secara berturut-turut didominasi oleh Kecamatan Cigudeg, Ciomas, Dramaga, Klapanunggal dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 5. Distribusi Skala Usaha Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2021

Kecamatan	Skala Usaha				Grand Total
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro	
Babakan Madang	0.0%	16.0%	16.0%	68.0%	100%
Bojong Gede	4.0%	36.0%	36.0%	24.0%	100%
Caringin	8.0%	4.0%	16.0%	72.0%	100%
Cariu	2.0%	2.0%	24.0%	72.0%	100%
Ciampea	0.0%	1.6%	15.9%	82.5%	100%
Ciawi	0.0%	14.3%	18.4%	67.3%	100%
Cibinong	0.0%	4.0%	5.3%	90.7%	100%
Cibungbulang	0.0%	5.9%	25.5%	68.6%	100%
Cigombong	0.0%	5.7%	11.3%	83.0%	100%
Cigudeg	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100%
Cijeruk	0.0%	0.0%	8.0%	92.0%	100%
Cileungsi	14.3%	24.5%	14.3%	46.9%	100%
Ciomas	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100%
Cisarua	4.0%	24.0%	28.0%	44.0%	100%
Ciseeng	0.0%	1.4%	1.4%	97.3%	100%
Citeureup	0.0%	0.0%	4.0%	96.0%	100%
Dramaga	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100%
Gunung Putri	0.0%	0.0%	16.0%	84.0%	100%
Gunung Sindur	0.0%	0.0%	2.2%	97.8%	100%
Jasinga	0.0%	3.9%	0.0%	96.1%	100%
Jonggol	3.6%	12.7%	14.5%	69.1%	100%
Kemang	0.0%	3.9%	17.6%	78.4%	100%
Klapanunggal	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100%
Leuwiliang	0.0%	4.0%	14.0%	82.0%	100%
Leuwisadeng	0.0%	0.0%	19.2%	80.8%	100%
Nanggung	0.0%	0.0%	23.1%	76.9%	100%
Pamijahan	0.0%	8.0%	0.0%	92.0%	100%
Parung	0.0%	7.7%	17.3%	75.0%	100%
Ranca Bungur	0.0%	2.1%	6.3%	91.7%	100%
Rumpin	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
Sukajaya	0.0%	23.1%	65.4%	11.5%	100%
Sukamakmur	0.0%	16.0%	18.0%	66.0%	100%
Sukaraja	0.0%	0.0%	12.0%	88.0%	100%
Tajurhalang	0.0%	0.0%	2.9%	97.1%	100%
Tamansari	6.0%	10.0%	30.0%	54.0%	100%
Tanjungsari	0.0%	0.0%	17.4%	82.6%	100%
Tenjo	0.0%	4.0%	22.0%	74.0%	100%
Tenjolaya	0.0%	6.0%	38.0%	56.0%	100%
Kabupaten	1.1%	6.4%	14.1%	78.4%	100%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

3.5. Skala Usaha Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tabel 6. menggambarkan Distribusi Skala Usaha Berdasarkan Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bogor dimana industri besar dengan tingkat pendapatan lebih dari 5 juta menduduki posisi teratas yaitu sebesar 61,54%. Tingkat pendapatan pada industri menengah didominasi range nominal 1 juta sampai dibawah 1,5 juta yaitu sebesar 71,43%. Tingkat pendapatan pada range 250 ribu sampai dibawah 500 ribu mendominasi skala usaha kecil. Sementara skala usaha mikro didominasi range pendapatan kurang dari 100 ribu dengan jumlah 83,69%.

Tabel 6. Distribusi Skala Usaha Berdasarkan Tingkat Pendapatan di Kabupaten Bogor

Tingkat Pendapatan Tahun 2019 (Rp juta)	Jumlah	%	Skala Usaha				Total
			Besar	Menengah	Kecil	Mikro	
1 < 100	1502	92.3	0.20%	2.73%	13.38%	83.69%	100%
2 100 - 249,99	60	3.7	0.00%	51.67%	23.33%	25.00%	100%
3 250 - 499,99	12	0.7	0.00%	33.33%	58.33%	8.33%	100%
4 500 - 749,99	6	0.4	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100%
5 750 - 999,99	4	0.2	0.00%	75.00%	25.00%	0.00%	100%
6 1000 - 1499,99	7	0.4	14.29%	71.43%	14.29%	0.00%	100%
7 1500 - 1999,99	11	0.7	9.09%	63.64%	18.18%	9.09%	100%
8 2000 - 4999,99	12	0.7	41.67%	41.67%	16.67%	0.00%	100%
9 > 5 000	13	0.8	61.54%	38.46%	0.00%	0.00%	100%
Grand Total	1627	100	1.11%	6.39%	14.20%	78.30%	100%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

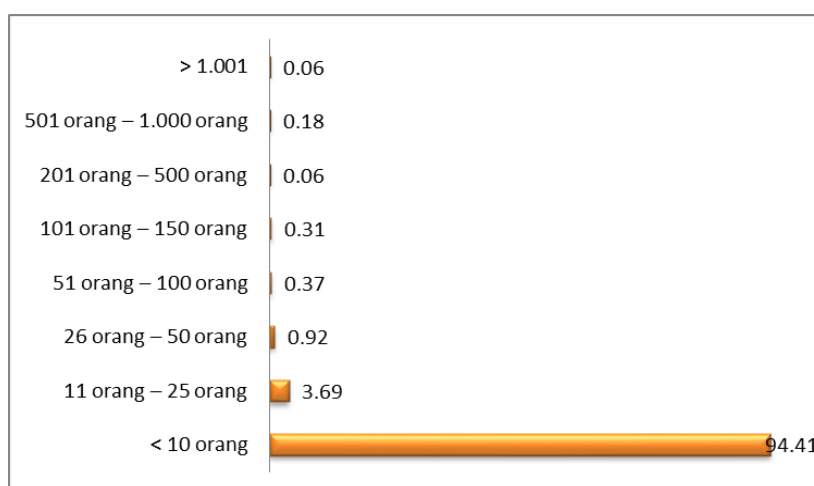
3.6. Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Pekerja

Distribusi skala usaha berdasarkan jumlah pekerja dapat dilihat pada Tabel 7. Dari tabel tersebut dapat diketahui industri besar didominasi jumlah pekerja antara 201-500 orang dan diatas 1.001 yaitu sebesar 100%, industri menengah didominasi jumlah pekerja antara 26-50 orang yaitu sebesar 80%. Adapun industri kecil didominasi jumlah pekerja antara 11-25 orang sebesar 41,7% dan jumlah pekerja industri mikro kurang dari 10 orang sebesar 82,6%.

Tabel 7. Distribusi Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Pekerja

Jumlah Pekerja Per Januari 2020 (orang)	Jumlah	%	Skala Usaha				Total
			Besar	Menengah	Kecil	Mikro	
1 < 10	1536	94.4	0.2%	4.1%	13.2%	82.6%	100.0%
2 11 - 25	60	3.7	10.0%	38.3%	41.7%	10.0%	100.0%
3 26 - 50	15	0.9	6.7%	80.0%	13.3%	0.0%	100.0%
4 51 - 100	6	0.4	50.0%	33.3%	16.7%	0.0%	100.0%
5 101 - 150	5	0.3	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100.0%
6 201 - 500	1	0.1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
7 501 - 1000	3	0.2	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
8 1.001 ke atas	1	0.1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Grand Total	1627	100	1.1%	6.4%	14.2%	78.3%	100.0%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021



Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Gambar 4. Distribusi Jumlah Pekerja Per 1 Januari 2020 (%)

Dari Gambar 5. Diatas dapat dilihat bahwa mayoritas sektor usaha di Kabupaten Bogor berada pada jumlah pekerja kurang dari 10 orang yaitu sebesar 94,41%. Artinya, mayoritas berada pada level usaha mikro. Kondisi demikian menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan program yang tepat guna meningkatkan level usaha dari level mikro ke jenjang lebih kecil.

3.7. Tingkat Pendapatan Berdasarkan Jumlah Pekerja

Tabel 8. Distribusi Tingkat Pendapatan Menurut Jumlah Pekerja

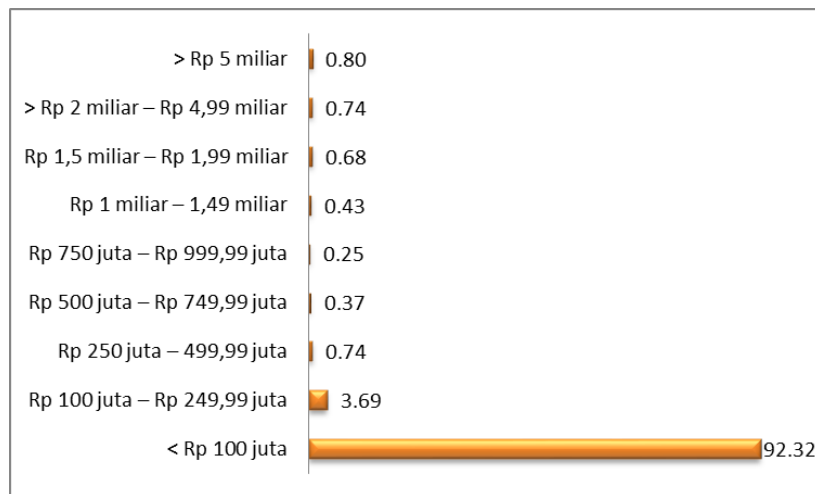
Tingkat Pendapatan Tahun 2019 (Rp juta)	Jumlah Pekerja							TOTAL
	<10	11 - 25	26 - 50	51 - 100	101– 150	151 - 500	501 - 1001	
1 < 100	98.54%	1.26%	0.13%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	100%
2 100 - 249,99	66.67%	30.00%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
3 250 - 499,99	41.67%	25.00%	25.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	100%
4 500 - 749,99	16.67%	50.00%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
5 750 - 999,99	0.00%	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
6 1000 - 1499,99	71.43%	14.29%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
7 1500 - 1999,99	18.18%	63.64%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
8 2000 - 4999,99	27.27%	45.45%	27.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
9 > 5 000	0.00%	7.69%	0.00%	30.77%	23.08%	7.69%	30.77%	100%
Grand Total	94.46%	3.69%	0.92%	0.31%	0.31%	0.06%	0.25%	100%

Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Dari Tabel 8. diatas dapat diketahui bahwa jumlah pekerja kurang dari 10 orang didominasi pendapatan kurang dari Rp 100.000, jumlah pekerja 11-25 orang didominasi pendapatan Rp. 750.000-<Rp 1.000.000, jumlah pekerja 26-50 orang didominasi pendapatan Rp 2.000.000-<5000.000, dan jumlah pekerja 51-1001 orang didominasi pendapatan diatas Rp 5.000.000.

Selanjutnya, untuk mengetahui distribusi tingkat pendapatan dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahuibahwa mayoritas tingkat pendapatan pertahun sebesar

< Rp 100.000.000 yaitu sebesar 92,32. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan pada sektor usaha di Kabupaten Bogor belum optimal.



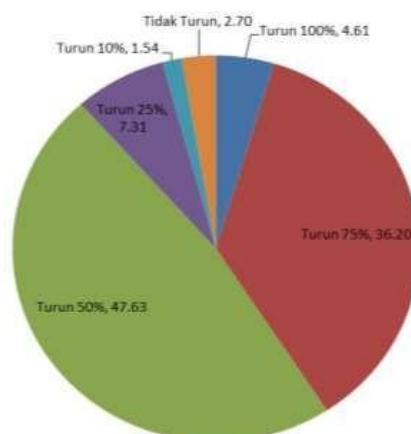
Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Gambar 5. Distribusi Tingkat Pendapatan Tahun 2019 (%)

3.8. Dampak Covid-19 Terhadap Aktivitas Kegiatan Usaha

Informasi jumlah pekerja per 1 Januari sampai saat ini telah dipengaruhi oleh kondisi dampak Pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), dunia usaha yang didominasi UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat (Kemenko Perekonomian RI, 2021).

Hal tersebut diatas sejalan dengan kondisi Kabupaten Bogor yang tergambar pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6. Dapat diketahui bahwa 50% kegiatan usaha pada level mikro mengalami penurunan. Sementara skala usaha lainnya juga mengalami level penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuhkembangkan berbagai ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (*social entrepreneurship*). Selain itu, pemerintah juga perlu membangkitkan gairah usaha dengan berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.



Sumber: Data Survei (Diolah), 2021

Gambar 6. Dampak Covid-19 terhadap Aktivitas Kegiatan Usaha

4. PENUTUP

Potensi ekonomi di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa secara agregat kecenderungan potensi ekonomi lebih didominasi oleh sektor usaha sekunder, kecuali Kecamatan Bojonggede, Cariu, Ciampea, Cibungbulang, Cigudeg, Leuwisadeng, Parung, Tamansari, Tenjo dan Tenjolaya. Masing-masing sektor usaha yang mengisi potensi ekonomi di setiap kecamatan sangat bervariasi, akan tetapi kecenderungan besarnya pada empat sektor ekonomi yakni Industri Pengolahan (58,8%), Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum (10,9%), Perdagangan Besar dan Eceran (10,0%), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (9,2%). Secara kumulatif kekuatan potensi ekonomi Kabupaten Bogor yaitu primer (9,4%), sekunder (60,1%) dan tersier (31,0%). Skala usaha mikro masih mendominasi potensi ekonomi di masing-masing kecamatan, sehingga atribut usaha seperti pendapatan dan tenaga kerja mengikuti besaran skala usaha tersebut. Adapun secara terperinci skala usaha tersebut terbagi menjadi empat yakni besar (1,1%), menengah (6,4%), kecil (14,1%) dan mikro (78,4%). Data yang ditabulasikan sesuai fakta lapangan tidak terhindar dari dampak ekonomi hampir setahun atau sekitar 10 bulan terakhir.

Guna mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap potensi ekonomi daerah baik tingkat kabupaten/kotamadya maupun sampai level kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Bogor Pertumbuhan Ekonomi 2018*. BPS, Jakarta.
- Haryono, D., & Hudoyo, A. (2019). Identifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Indonesian Journal of Socio Economics*, 1(1), 12-23.
- Kemenko Perekonomian RI. (2021). Dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemi. Diakses 22 Juli 2021 dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

- Kurniawan, B. (2016). Analisis sektor ekonomi unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1-26.
- Julianto, J., & Suparno, S. (2016). Analisis pengaruh jumlah industri besar dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 229-256.
- Maqin, A. (2014). Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika Journal*, 10(1), 10-18.
- Prasetya, E. R. (2018). Analisis sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Bogor. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4), 381-390
- Putra, S. H. (2018). *Potensi Ekonomi Obyek Wisata Pantai Gemah dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar di Kabupaten Tulungagung* (Skripsi). UIN Satu Tulungagung, Jawa Timur.
- Rizani, A. (2017). Analisis potensi ekonomi di sektor dan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 137-156.
- Setiandono, P. (2021). *Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang* (Tesis). Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara.
- Suryani, T. (2013). Analisis peran sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang (Analisis tabel input output Kabupaten Pemalang Tahun 2010). *Economics Development Analysis Journal*, 2(1).
- Sutikno, B., & Batoro, D. (2016). Potensi ekonomi dan peran koperasi susu dalam pembangunan masyarakat lokal. *AGROMIX*, 7(1).
- Takalumang, V. Y. (2018). Analisis sektor ekonomi unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).